



## **Inkonsistensi Program Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah**

**Aldi Gumuruh Wicaksono**

Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Email: aldi.gumuruh@ipdn.ac.id

**Sekar Arrum Permata**

Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Email: sekar20@gmail.man9-jkt.sch.id

**\*Abdul Rahman**

Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
abdulrahman.ipdn77@gmail.com

\*Korespondensi

**Article History:** Received: 20-10-2022, Revised: 25-12-2022 Accepted: 27-12-2022, Published: 29-12-2022

### **Abstrak**

NTB memiliki jumlah kasus pernikahan dini yang tinggi, mencapai 56,07% pada tahun 2018-2019. Untuk mendukung kemandirian program dan daya saing perempuan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat mendirikan Sekolah Pemberdayaan Perempuan sebagai Kepala Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inkonsistensi program pemberdayaan perempuan berkelanjutan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah; mengetahui upaya masyarakat mengatasi inkonsistensi program; dan memaparkan inovasi-inovasi untuk mendukung program pemberdayaan perempuan berkelanjutan di sekolah-sekolah PEKKA di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat program pemberdayaan perempuan yang tidak berkelanjutan atau tidak konsisten akibat terhentinya bantuan dari pemerintah atau proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Daerah untuk terlibat dalam pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan adalah mengembangkan website ramah PEKKA untuk sosialisasi dan informasi kepada stakeholder PEKKA dan pemerintah.

### **Kata Kunci:**

inisiasi; inovasi; kemandirian; PEKKA; pemberdayaan

### **Abstract**

NTB has a high number of cases of early marriage, reaching 56.07% in 2018-2019. To support program independence and women's competitiveness in Gemel Village, Central Lombok District, the community established a Women's Empowerment School as the Head of the Family. This study aims to determine the inconsistency of sustainable women's empowerment programs in Gemel Village, Central Lombok Regency; know the community's efforts to overcome program inconsistencies; and explain innovations to support sustainable women's empowerment programs at PEKKA schools in Gemel Village, Central Lombok Regency. This study uses a descriptive method with an inductive approach.

The results of the study indicate that there are women's empowerment programs that are unsustainable or inconsistent due to the cessation of assistance from the government or partnership projects between the governments of Indonesia and Australia. Regions to be involved in sustainable women empowerment. The innovation has been made in developing a PEKKA-friendly website for outreach and information with PEKKA stakeholders and the government.

**Keywords:**

empowerment; independence; initiation; innovation; PEKKA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Negara-negara di berbagai penjuru dunia sedang berupaya mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau “*Sustainable Development Goals*” (SDGs). Salah satu wujud nyata aksi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan dari SDGs itu sendiri adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Kesetaraan gender adalah keadaan bagi perempuan dan laki-laki menikmati status dan kondisi yang sama untuk merealisasikan hak azasinya secara penuh dan sama-sama berpotensi dalam menyumbangkannya dalam pembangunan (Widayani & Hartati, 2014).

Komisi Nasional Perempuan (2019) mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya 2018 yaitu 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Hal ini membuktikan tindakan kekerasan dan tindakan ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB secara kumulatif masih tinggi sebesar 3.109 kasus yang terjadi pada tahun 2017-2019. Banyak kasus berdasarkan kabupaten/kota tahun 2017-2019 yaitu; 1) Kota Mataram terdapat 273 kasus; 2) Lombok Barat 159 kasus; 3) Lombok Tengah 298 kasus; 4) Lombok Timur 350 kasus; 5) Lombok Utara 288 kasus; 6) Sumbawa Barat 147 kasus; 7) Sumbawa 316 kasus; 8) Dompu 467 kasus; 9) Kab. Bima 433 kasus; dan 10) Kota Bima 378 kasus (DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

Berdasarkan data di atas, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada kabupaten/kota di Provinsi NTB termasuk tinggi yang menandakan belum optimalnya pemenuhan hak-hak atas perempuan dan anak di daerah NTB. Berdasarkan pernyataan Kasi Ekonomi Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, bahwa “faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTB adalah masih tingginya angka pernikahan dini. Hal ini mengakibatkan banyaknya perempuan-perempuan yang masih muda sudah menjanda yang harus melanjutkan kehidupannya sendiri dan kehilangan hak-haknya sebagai perempuan” (Wawancara pribadi, 7 Februari 2020).

Pernyataan tersebut didukung oleh data jumlah perempuan yang melakukan pernikahan dini provinsi NTB tercatat tahun 2016 sebanyak 34,90 %, tahun 2017 sebanyak 51,19 % dan tahun 2018 sebanyak 56,07 %. Termasuk tertinggi ke-dua nasional setelah Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa masih banyaknya pernikahan di bawah umur di provinsi NTB (Fitriah, 2018). Angka tersebut sangat merisaukan, mengingat efek domino dari pernikahan dini tersebut terhadap kualitas kehidupan masyarakat sangat kompleks. Dalam bidang kesehatan pernikahan dini dapat memicu tingginya kematian ibu dan bayi; tingginya gizi buruk (*stunting*); dan sebagainya. Dalam bidang sosial budaya, semakin tingginya angka perceraian ibu-ibu muda atau status janda semakin banyak dan lain-lain. Untuk data kerawanan *stunting* per kabupaten/kota di NTB tahun 2018 masih buruk. Kategori ini dapat dijelaskan dari data yang didapatkan dari surat kabar Suara NTB yaitu; 1) Kota Mataram, penderita 24,42% kategori cukup baik; 2) Kabupaten Lombok Barat, penderita 33,61% kategori buruk; 3) Kabupaten Lombok Tengah, penderita 31,05% kategori buruk; 4) Kabupaten Lombok Utara, penderita 29,20% kategori cukup baik; 5) Kabupaten Lombok Timur, penderita 43,52% kategori sangat buruk; 6) Kabupaten Dompu, penderita 33,83% kategori buruk; 7) Kota Bima, penderita 32,81% kategori buruk; 8) Kabupaten Bima, penderita 32,01% kategori buruk; 9) Kabupaten Sumbawa, penderita 31,53% kategori buruk; dan 10) Kabupaten Sumbawa Barat, penderita 18,32% kategori baik (Suara NTB, 25 Oktober 2019).

Berdasarkan data di atas *stunting* di NTB tergolong buruk, hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yang kategorinya baik. Sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya dalam kategori kurang, buruk dan sangat buruk. Dengan demikian, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat mengatasi kerawanan tersebut, melalui berbagai sektor, tidak hanya menjadi ranahnya sektor kesehatan, tetapi juga sektor sektor lain yang dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB Tahun 2019 mencapai 68,14 dengan level sedang dan menduduki peringkat 29 nasional, dan masuk kategori tercepat ke-5 dalam pertumbuhan kecepatan IPM (BPS Provinsi NTB, 2020). Dengan demikian, berdasarkan data peringkat IPM NTB tahun 2019, indeks pembangunan dan pemberdayaan gender masih belum baik. Faktor penentu utama dari IPM adalah sumber daya manusia, karena selain sebagai pelaku pembangunan, juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Sumber Daya Manusia mencakup aparatur, pegawai, karyawan, personalia, dan lain-lain yang berkenaan dengan subjek orang atau manusia (Rahman & Bakri, 2019).

Salah satu inisiasi pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengatasi permasalahan perempuan di Indonesia adalah program "MAMPU" yang merupakan program pemberdayaan perempuan. Didalam program MAMPU tersebut terdapat bidang-bidang kegiatan yang meliputi Migrant Care, PEKKA, BaKTI, Kapal Perempuan, KLIK, Pipa-JKL. Terkait dengan kesetaraan gender di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984 dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Pusparani, 2016).

Sementara upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah di atas adalah membentuk kelompok-kelompok yang tergabung dalam sekolah PEKKA, PEKKA merupakan akronim dari Perempuan Kepala Keluarga. Sekolah PEKKA ini diperuntukkan untuk perempuan dengan kriteria: perempuan berstatus janda, perempuan yang ditinggal suami merantau tanpa kabar berita, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena faktor tertentu, dan perempuan disabilitas melalui pelatihan-pelatihan berupa usaha rumahan, sosialisasi, penanaman karakter, motivasi, monitoring dan lain-lain yang berguna bagi perempuan agar dapat dan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya.

Sekolah PEKKA di Kabupaten Lombok Tengah didirikan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat. Sekolah PEKKA ini telah beberapa kali mendapatkan penghargaan atas keberhasilan program-program yang dijalankan dan telah di apresiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.

Namun belakangan ini, program-program dari Sekolah PEKKA mulai meredup seiring dengan berakhirnya program kemitraan. Beberapa program yang telah diinisiasi oleh pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Australia, bahkan tidak lagi berjalan sesuai harapan pihak kemitraan yaitu berkelanjutan program secara mandiri oleh masyarakat desa. Sementara kontrol dari pemerintah daerah Lombok Tengah pun tidak dijalankan dengan baik, sehingga sekolah PEKKA yang telah diadakan lambat laun menjadi mati suri. Permasalahan ini tentunya membutuhkan perhatian pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi sekolah PEKKA dan menjalankan program-programnya secara berkelanjutan.

Upaya inovatif untuk mensosialisasikan dan memperluas jaringan harus terus dioptimalkan guna promosi keberadaan sekolah PEKKA dan promosi pemasaran jasa pendidikan untuk masyarakat luas, Namun karena kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya perhatian pemerintah daerah menyebabkan lamban laun sekolah ini semakin melemah dan mulai ditinggal anggotanya. Upaya promosi untuk menjangkau peserta didik baru pun hampir tidak ada, sehingga nol peminat. Diperlukan sarana promosi dan sosialisasi yang tepat yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat dan pemerintah dalam rangka mempertahankan program pemberdayaan berkelanjutan yang dinilai sangat membantu kebutuhan masyarakat, terutama perempuan.

Saat ini kebijakan tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat variatif, namun seringkali program pemberdayaan masyarakat tersebut hanya bersifat proyek, yang kurang mendidik dan memotivasi masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Program yang bersifat *charity* justru menimbulkan ketergantungan dan jauh dari kemandirian (Rahman, 2022). Pada akhirnya program pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah lambat laun menjadi inkonsistensi dan mati suri akibat dari pendekatan pemberdayaan yang kurang tepat dan kurangnya perhatian pemerintah. Perhatian pemerintah sebagai inisiator, fasilitator, motivator dan pendamping masyarakat, setelah program berjalan justru semakin menurun dan berhenti sama sekali, sehingga program pemberdayaan dinilai gagal.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peran dan struktur masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif dan lebih baik, agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak. Ada 3 proses pentahapan pemberdayaan masyarakat menurut Priyono adalah pertama, tahap

inisiasi, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan oleh pihak luar dan diperuntukkan bagi masyarakat. dalam fase ini, masyarakat masih bersifat pasif. Kedua, tahap partisipatoris, dimana masyarakat mendapatkan keberdayaan dari pihak luar, dilakukan bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat. dalam fase ini masyarakat baru berpartisipasi terhadap kegiatan yang disusun dan direncanakan pihak luar. Ketiga, tahap emansipatif, dimana masyarakat mendapat keberdayaan diri, oleh dan untuk mereka sendiri. Pada fase ini, masyarakat aktif memikirkan, merencanakan dan menentukan kegiatan secara self-self untuk mencapai harapan yang mereka inginkan (Suryono, 2015).

Pendapat di atas menekankan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan mendorong, memberi motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat. dalam hal ini dilakukan dengan penyediaan berbagai input, pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Ketiga, melindungi atau *protecting*.

Berdasarkan teori di atas, selayaknya pemberdayaan tidak hanya berhenti pada tahap inisiasi, karena masyarakat tidak cukup berdaya hanya dengan sosialisasi, melainkan perlu pendampingan secara berkelanjutan sampai sasaran pemberdayaan tersebut benar-benar dinyatakan mandiri. Ditambah lagi dengan kurangnya porsi pemberian peran kepada kaum perempuan yang diakibatkan karena pemahaman dan sikap piodal masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dalam hal kreativitas dan inovasi. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan atas pemberian peran yang tidak adil terhadap kaum perempuan, sehingga menambah ketidakberdayaan bagi kaum hawa terhadap ekonomi, sosial budaya dan politik.

Hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan berkelanjutan sudah banyak dilakukan dalam berbagai kasus dan perspektif. Penelitian Susilawati tentang penyebab ketidakberdayaan perempuan dalam meningkatkan daya saing pada dunia kerja adalah karena faktor budaya yaitu perbedaan pandangan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan dalam wilayah yang tidak adil secara gender, juga menjadikan perempuan dalam ruang sempit yang sulit untuk berkreasi baik secara ekonomi, sosial dan politik (Sulistyowati, 2015). Pada aspek lain hasil penelitian Fitrianti & Habibullah (2012) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Kecamatan Majalaya disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai terhadap pendidikan. Ada juga penelitian Kurniawanto & Anggraini (2019) tentang pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian.

Namun dari banyaknya penelitian tentang perempuan tersebut, belum banyak yang mencoba menghubungkan dengan faktor pemberdayaan sampai kepada tingkat kemandirian. Penelitian ini mencoba untuk menghubungkan faktor-faktor pemberdayaan mulai dari tahap inisiasi, partisipasi, dan emansipasi sesuai dengan teori pemberdayaan yang dinyatakan Priyono (Suryono, 2015). Penelitian ini berupaya melengkapi penelitian yang sudah ada terutama dalam konteks

inkonsistensi program tersebut dalam pelaksanaannya memberdayakan peran-peran perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang program pemberdayaan perempuan berkelanjutan. Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu; mengetahui inkonsistensi program pemberdayaan perempuan berkelanjutan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah; mengetahui upaya masyarakat untuk mengatasi inkonsistensi program; dan menjelaskan inovasi untuk mendukung program pemberdayaan perempuan berkelanjutan pada sekolah PEKKA Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah. Urgensi penelitian ini dapat dilihat pada aspek program pemberdayaan perempuan sampai tahap kemandirian. Pemberdayaan perempuan dalam beragam perspektif tidak boleh berhenti hanya pada program semata, tetapi harus sampai pada tujuan utama yakni kemandirian.

## **Metode**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu susunan atau kerangka yang disusun secara terstruktur dalam melakukan suatu penelitian yang dalamnya berisi prosedur-prosedur tentang bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan dan bagaimana proses pemecahan masalahnya (Malhotra, 2006). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki produk berupa data deskriptif yang disajikan dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai informan (Moleong, 2014). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran keadaan berlandaskan pada data/fakta-fakta yang ada di lapangan yang selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang relevan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan memberikan hasil berupa gambaran lebih spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan yang terjadi di lapangan (Neuman, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dijadikan sebagai sumber data primer. Dokumen-dokumen, arsip-arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder (Sugiyono, 2012). Informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Gemel dan penggiat sekolah PEKKA Lombok Tengah, Aparatur DP3AP2KB Provinsi NTB, dan tokoh masyarakat lainnya yang diketahui mengetahui banyak tentang kegiatan Sekolah PEKKA di Lombok Tengah. Analisis data menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Inkonsistensi Program Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan di Desa Gemel Kabupaten Lombok Tengah**

Istilah Pemerintahan merujuk kepada pelaksanaan kegiatan kekuasaan dalam berbagai ranah publik (Labolo, 2014), termasuk di dalamnya pemberdayaan terhadap perempuan. Berbagai program telah digalakkan oleh pemerintah baik itu secara umum melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun melalui beberapa dinas-dinas terkait di daerah seperti Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di NTB sendiri melalui DP3AP2KB telah membuat berbagai macam program kerja dalam rangka menciptakan ketertiban serta meningkatkan produktivitas dan peran wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Ermaya Suradinata, Ketertiban merupakan ketentuan peraturan, kesopanan, sikap yang baik dalam bergaul serta keadaan tertib (Gahansa & Mantiri, 2018). Berbagai program kerja tersebut meliputi; Kabupaten Layak Anak, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Posyandu Integrasi, Pelatihan Calon Wakil Rakyat bagi para kaum wanita yang ingin berkarir di dunia perpolitikan, Program Manajemen Usaha dimana program ini fokus dalam bidang peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan-pelatihan usaha kecil menengah (UKM), Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang terdapat di 10 kabupaten/kota dimana objeknya adalah desa-desa stunting yang memiliki PUP tinggi. Selanjutnya ada juga program pendampingan dalam membuat semacam peraturan desa (perdes) ataupun peraturan adat (awig-awig) tentang pendewasaan perkawinan melalui kelompok dialog warga. Dan yang terakhir adalah Forum Puspa (Forum Partisipan Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) merupakan tempat pelaporan segala program maupun kegiatan kelompok perempuan kepada dinas, dimana tujuannya adalah agar semua terintegrasi menjadi satu (Kepala Dinas, wawancara pribadi, 7 Februari 2022).

Menurut pandangan masyarakat umum kesejahteraan masyarakat semata-mata hanya berkaitan tentang kegiatan pemberian bantuan sosial berupa barang atau uang kepada masyarakat miskin. Esensi kesejahteraan yang sebenarnya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal, pemberian pelatihan maupun keterampilan (Rahman, 2018). Tingkat kesejahteraan dari anggota organisasi perlu mendapat perhatian lebih dari suatu organisasi. Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan yang baik sangat berpengaruh terhadap peningkatan motivasi dalam bekerja dan mendorong produktivitas kerja karyawan serta membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dalam suatu organisasi (Hasibuan, 2008).

Di antara sekian banyaknya program dari DP3AP2KB, satu program yang memang menjadi program unggulan yaitu program PEKKA. PEKKA ini merupakan kepanjangan dari Perempuan Kepala Keluarga. PEKKA adalah sebuah kelompok pemberdayaan perempuan yang sasarannya itu kelompok janda cerai, wanita korban kekerasan, kelompok wanita yang ditinggal suami merantau tanpa kejelasan, Suami sakit menahun (sehingga memaksa wanita tersebut menjadi Kepala Keluarga), serta gadis yang terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga karena keadaan.

Menurut beberapa anggota Serikat PEKKA Provinsi NTB, awal berdirinya PEKKA banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para penggiat serikat PEKKA, tantangan yang justru datang dari masyarakat setempat yaitu berupa penolakan-penolakan dari masyarakat itu sendiri, namun berkat semangat dan kerja keras dari para penggiat serikat PEKKA, semua tantangan tersebut sedikit demi sedikit dapat dilalui. Hingga saat ini program PEKKA telah bekerja di 20 provinsi, 34 kabupaten/kota dan 129 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Untuk menjalankan program PEKKA tersebut maka didirikanlah Sekolah PEKKA yang diinisiasi dan dipromosikan melalui kegiatan nasional dan orasi-orasi yang dilaksanakan ke masyarakat. Sekolah PEKKA berkerjasama dengan salah satu

kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Program MAMPU. MAMPU mempunyai beberapa program didalamnya seperti BaKTI, Migrant Care, Kapal, dan PEKKA.

Satu-satunya sekolah PEKKA yang didirikan di Kabupaten Lombok Tengah adalah yang berada di Desa Gemel Kecamatan Jonggat. Khusus untuk di Kabupaten Lombok Tengah, program PEKKA telah mulai berjalan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata dengan jumlah anggota keseluruhannya sebanyak 578 orang.

Adapun program sekolah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat terdiri dari beberapa bidang diantaranya: Pertama bidang ekonomi berupa simpan pinjam dari Swadaya Masyarakat. Kedua bidang hukum, pada bidang ini memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan CTH; masalah KDRT, perceraian. Ketiga, bidang kesehatan, bidang ini mendorong masyarakat untuk lebih mengandalkan pada pengobatan menggunakan apotek hidup/tanaman tradisional sehingga tidak terlalu bergantung pada dokter. Keempat, bidang politik, bidang ini memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada dunia politik. Kelima, bidang pendidikan yaitu berupa program pendidikan sepanjang hayat yang memiliki tujuan untuk menekan angka buta huruf sehingga terwujudkannya Keaksaraan Nasional. Akademi Paradigta mengajarkan hal-hal terkait pengelolaan desa, pembuatan peraturan desa dan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan pelatihan salon dan tata rias kecantikan rambut (Hj. Halimah, Wawancara pribadi, 8 Februari 2020).

Pemerintah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB NTB melalui giat aktif menggalakkan program-program pemberdayaan khususnya perempuan yang dikategorikan masih cukup tinggi kerawanan terhadap perempuan. Tujuan dari pelaksanaan ini agar kaum perempuan di NTB dapat keluar dari lingkup kemiskinan dengan mampu mandiri untuk menghidupkan dirinya dan keluarganya. Lebih jelasnya, program sekolah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.



**Tabel 1.** Program Sekolah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat

No.	Bidang	Program/Keitany	Keterangan
1.	Ekonomi	1. Simpan pinjam swadaya masyarakat 2. Koperasi Ahlam PEKKA	Berkelanjutan Berkelanjutan
2.	Hukum	1. KLIK PEKKA (Klik Perlindungan Hukum dan Sosial) 2. <i>One Day One Service</i> / Yandu (Pembuatan KTP, KK, buku nikah, BPJS, dan lain-lain)	Berkelanjutan Terakhir 2019
3.	Kesehatan	Penggalakkan program Apotik Hidup (agar tidak terlalu bergantung kepada dokter)	Berkelanjutan
4.	Politik	Menanamkan jiwa kepemimpinan perempuan untuk dapat berkiprah pada tingkat desa dan kabupaten	Terakhir 2018 (Inkonsistensi)
5.	Pendidikan	1. Pendidikan Sepanjang Hayat (Upaya menekan angka buta huruf dan mewujudkan keaksaraan nasional) 2. Akademi Paradigta (Sekolah Non-Formal bagi Kaum Wanita) 3. Pelatihan salon dan tata rias kecantikan rambut	Terakhir 2018 (Inkonsistensi) Terakhir 2018 (Inkonsistensi) Berkelanjutan

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Hj. Halimah

Berdasarkan data di atas, walaupun program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah telah dapat dijalankan, namun tidak semua program dapat berkelanjutan atau dengan kata lain inkonsistensi. Seperti program pendidikan Akademi Paradigta yang berakhir tahun 2018, seiring dengan berakhirnya program kemitraan dari pemerintah Indonesia-Australia. Hal ini menandakan bahwa program atau kegiatan Akademi Paradigta yang dilaksanakan oleh kelompok PEKKA di Desa Gemel tersebut memerlukan *support* dari pemerintah maupun pihak lain, mengingat berbagai kendala terutama kendala anggaran, sumber daya manusia, dan media promosi.

### Upaya Masyarakat Untuk Mengatasi Inkonsistensi Program

Pemberdayaan terhadap perempuan bukan saja menjadi tanggungjawab dari Pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab bersama. Masyarakat perlu untuk berpartisipasi dan mengambil peran untuk mendukung program-program dari Pemerintah. Peran (*role*) diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mampu untuk mengkombinasikan serta menyinergikan hak dan tanggungjawab menurut kedudukannya. Peran mengandung makna sekumpulan perbuatan yang diharapkan secara khusus yang disampaikan kepada objek penerima pesan (Rukmana, 2020). Seseorang dapat dikatakan telah menjalankan peranan jika seseorang tersebut telah melaksanakan kewajibannya dengan baik lalu kemudian orang tersebut memperoleh haknya sesuai dengan posisi atau kedudukannya (Soekanto, 2017). Definisi peran menurut teori pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Soekanto diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: Peran Preventif, Peran Represif, Peran Persuasif dan Peran Koersif (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Salah satu partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat adalah komitmen untuk mengawal pencegahan pernikahan anak dan kekerasan keluarga dengan mendirikan “Forum Pemangku Kepentingan” tingkat kabupaten Lombok Tengah. Forum ini telah bekerjasama dan mendapat persetujuan dari beberapa pihak terkait,

diantaranya; Bupati Lombok Tengah, Polres, Dandim 1620, DPRD, Bappeda, DP3AP2KB, Pengadilan Agama, Kemenag, Dinkes, DPMD, Dinas Pendidikan, Konsorsium, Dinas Sosial, para tokoh adat, Serikat PEKKA serta Dewan Persatuan Kabupaten Lombok Tengah.

Partisipasi lainnya dalam bidang hukum adalah pelayanan kependudukan (Yandu) *One Day Service* yang merupakan pengembangan dari program “Klik Perlindungan Hukum dan Sosial” yang dulunya merupakan wadah penyampaian aspirasi bagi kaum wanita. Program ini pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi NTB dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi perempuan. Program Yandu ini mampu dengan pesat menggerakkan serta mengubah pola pikir masyarakat desa untuk melengkapi dokumen penting mereka seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan lainnya.

Partisipasi dalam bidang ekonomi, sekolah PEKKA mendirikan lembaga koperasi yang bernama Koperasi Ahlam PEKKA untuk membantu anggota mendapatkan modal usaha. Koperasi ini pernah mendapatkan penghargaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah sebagai koperasi yang memiliki SHU terbanyak. Program ini diupayakan terus berkembang dan berkelanjutan bukan hanya pada aspek simpan pinjam swadaya masyarakat tetapi juga pada aspek pertokoan, kerajinan songket dan anyaman ketak, pertanian dan peternakan. Program ini juga masih tetap berlangsung dan berkelanjutan.

Partisipasi dalam bidang pendidikan, melalui Akademi Paradigta sekolah PEKKA merangkul para wanita distabilitas bahkan dalam hal pelayanan, para disabilitas akan lebih didahulukan. Hanya saja di Desa Gemel sendiri anggotanya belum ada yang dari latar belakang distabilitas. Agar Akademi Paradigta ini tetap berjalan dan berkelanjutan, para penggiat PEKKA Desa Gemel telah melakukan berbagai pendekatan dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa, agar di masing-masing desa dimasukkan anggaran untuk Akademi Paradigta ini.

Akademi ini merupakan sekolah non-formal bagi kaum hawa termasuk juga wanita disabilitas yang memiliki niat untuk maju dan memajukan desanya masing-masing. Lama pendidikan kurang lebih selama 1 tahun dengan 40 kali pertemuan. tenaga pengajar sekolah PEKKA bersumber dari para alumni PEKKA yang telah diberikan pelatihan di kantor pusat di Jakarta.

Materi yang diajarkan terkait pengelolaan desa, pembuatan perdes dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan desa, hal ini disebabkan lulusan akademi ini diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu contohnya adalah dengan menjadi anggota BPD. Lulusan akademi ini ada yang langsung disalurkan untuk berkerja dikantor desa dan ada juga yang membuka usaha sendiri.

Sekarang ini program MAMPU yang diinisiasi oleh kemitraan pemerintah Australia-Indonesia sudah tidak berperan aktif lagi kepada Sekolah PEKKA di Desa Gemel karena telah dianggap mampu dan mandiri dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan perempuan. Pada kenyataannya, kemandirian dari sekolah PEKKA ini belum berjalan sesuai harapan. Padahal khususnya pemerintah sendiri menaruh harapan besar kepada sekolah PEKKA untuk mampu menunjang pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk sekarang ini, sekolah PEKKA di Desa Gemel terlihat seperti mati suri, beberapa program yang diharapkan berkelanjutan terjadi inkonsistensi. Hal ini terlihat dari contohnya seperti Akademi Paradigta yang sudah berakhir tahun 2018,

dan selanjutnya sampai sekarang belum ada kegiatan lagi karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah dan pemerintah desa umumnya belum mengalokasikan sejumlah anggaran untuk Akademi Paradigma ini. Walaupun ada beberapa desa yang telah mengalokasikan sejumlah dana untuk Akademi Paradigma ini, namun jumlahnya masih sangat kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekolah PEKKA Desa Gemel masih belum memiliki kemandirian untuk melanjutkan program melalui akademi paradigma tersebut. Diperlukan bantuan dari pihak luar untuk dapat mendonasikan anggaran dan programnya untuk dilaksanakan di sekolah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat.

Pada aspek yang lain, program KLIK PEKKA (Klik Perlindungan Hukum dan Sosial) sampai sekarang masih berjalan, namun mengalami penurunan mengingat kurangnya kaderisasi dan banyaknya kader-kader PEKKA yang kurang aktif dan/atau berhenti. Karena kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program Sekolah PEKKA beberapa programnya sudah mengalami kemandagan.

Dalam rangka mempertahankan program-program yang berkelanjutan tersebut, diperlukan adanya media promosi yang dapat menjembatani sekolah PEKKA tersebut dengan pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menjalankan program kemitraan. Media promosi tersebut adalah *Website* PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat bekerjasama dengan IPDN Kampus NTB. Dengan *website* ini diharapkan dapat menjaring pihak-pihak luar untuk mendukung pengembangan sekolah PEKKA yang mandiri dan berkelanjutan. Disamping itu sebagai embrio untuk formulasi kebijakan untuk pengembangan sekolah PEKKA di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan merupakan serangkaian aktifitas, keputusan, sikap maupun rencana program yang dilakukan oleh para aktor (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

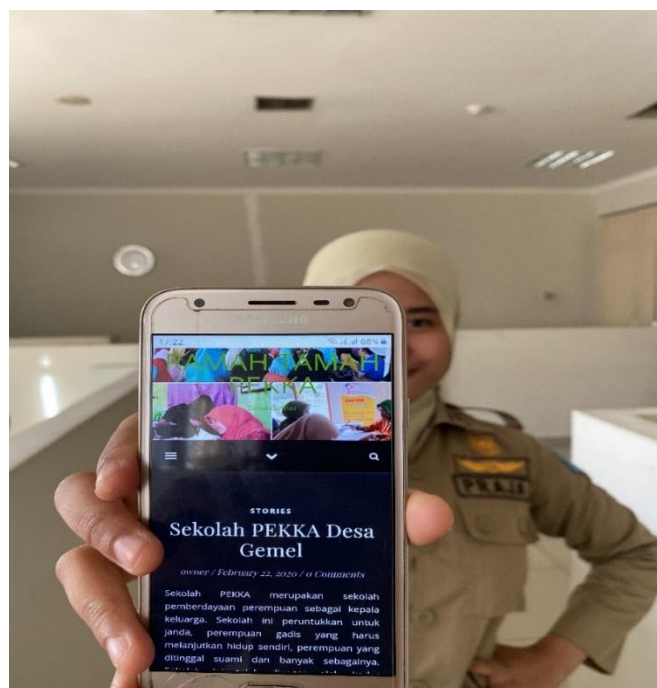
Pembuatan *website* PEKKA ini merupakan bentuk inovasi untuk mendukung program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan di Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

### **Inovasi untuk Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan pada Sekolah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat**

Dalam rangka mendukung terciptanya program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan perlu adanya strategi yang tepat. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai (Fred, 2011). Salah satu inovasi untuk mendukung program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat adalah dalam bentuk *website* yang diberi nama *website* "Ramah Tamah PEKKA Desa Gemel". "RAMAH TAMAH", yaitu akronim dari "Rajin di RuMAH TerAMPil di SekoLAH", suatu teknik yang akan dikembangkan oleh penggiat sekolah PEKKA dalam menyampaikan suatu informasi kepada seluruh anggota serikat PEKKA dan peserta Akademi Paradigma yang harapannya setiap pesertanya rajin belajar di rumah dan terampil di sekolah.

*Website* ini merupakan sebuah solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan yang terjadi di Desa Gemel. Di dalam *website* ini terdiri dari beberapa fitur meliputi: Beranda, Profil, Kegiatan, Donasi dan Kontak Kami. Pada fitur profil disajikan penjelasan singkat mengenai sekolah Ramah Tamah PEKKA sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai sekolah ini kepada para pengunjung web, terdapat juga Visi dan Misi sekolah PEKKA di dalam profil.

Berikutnya ada menu Kegiatan yang berisi kegiatan sekolah PEKKA dan sejauh ini terdapat dua kegiatan yaitu pelatihan salon dan tata rias rambut dan Koperasi Ahlam PEKKA. Kegiatan pelatihan merupakan unsur pendidikan yang berkaitan dengan proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan formal dan lebih mengedepankan metode praktik dibanding teori (Rivai, 2009). Umar menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan pelatihan dapat diukur dari beberapa indikator, diantaranya: 1) metode pelatihan, 2) banyaknya materi, 3) keterampilan penatar, 4) lama waktu pelatihan, 5) sasaran pelatihan, 6) aspek yang tidak dicantumkan, 7) alih pengetahuan, 8) tempat penyelenggara, 9) relevansi dengan pekerjaan, 10) penerapan hasil pelatihan pada pekerjaan, 11) perubahan perilaku setelah pelatihan, 12) efisiensi dan efektivitas pekerjaan setelah pelatihan (Umar, 2005). Didalam websitenya terdapat juga fitur berupa program unggulan dari sekolah PEKKA yang meliputi: Akademi Paradigta, KLIK PEKKA, *One Day Service*, Pendidikan Sepanjang Hayat dan Forum Pemangku Kepentingan. Dengan menu ini pengunjung dapat melihat apa saja program-program yang akan, sedang dan telah dijalankan oleh sekolah PEKKA.



**Gambar 1.** Website Ramah Tamah PEKKA Desa Gemel Kecamatan Jonggat

Bagi para pengunjung yang ingin membantu mengembangkan program Sekolah Ramah Tamah Pekka di Desa Gemel ini dapat memberikan bantuannya melalui menu Donasi. Terdapat juga menu kontak kami, dimana menu ini diperuntukkan bagi para pengunjung web yang tertarik dan ingin mengetahui informasi dan menghubungi kami lebih lanjut terkait sekolah ini.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa program pemberdayaan perempuan di Desa Gemel kabupaten Lombok Tengah memerlukan perhatian pemerintah daerah untuk

membantu keberlanjutan program yang sempat terhenti atau inkonsistensi, antara lain: upaya menanamkan jiwa kepemimpinan perempuan untuk dapat berkiprah pada tingkat desa dan kabupaten; gerakan pendidikan sepanjang hayat untuk menekan angka buta huruf dan mewujudkan keaksaraan nasional; dan Akademi Paradigma (Sekolah Non-Formal bagi Kaum Wanita). Upaya yang dilakukan atas program yang inkonsistensi adalah sosialisasi program secara luas melalui website PEKKA dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan perempuan agar lebih mandiri dan berdaya saing.

## Referensi

- BPS Provinsi NTB. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019. In *Bps.Go.Id* (Vol. 19, Issue 27). Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar-tpk-hotel-berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Fitrianti, R., & Habibullah, (2012). Gender Inequality in Education; Study of women condition in District Majalaya, Municipality Karawang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. 17(1): 85-100.
- Fitriah. (2018). "Merariq Kodeq" di NTB Masih Tinggi. <https://hariannusa.com/2018/03/28/merariq-kodeq-ntb-masih-tinggi/>
- Fred, R. D. (2011). *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep* (12th ed.). Salemba Empat.
- Gahansa, W. V., & Mantiri, M. (2018). Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20032>.
- Hasibuan, M. S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Vol. 7). Bumi Aksara.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, Y. (2019). Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127-137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.71>.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (Revisi Cet). PT. Raja Grafindo Persada.
- Malhotra, N. K. (2006). *Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan Jilid 2* (2nd ed.). PT. Indeks.
- Moleong, Ilexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 7* (7th ed.). PT. Indeks.
- Pusparani, S. P. (2016). Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Melalui Program Pelatihan Vokasi Berbasis Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Sosial Dan Politik*, 1–23. <http://hmhi.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/58/2016/05/Safira-Prabawidya-Pusparani-1306383981-Karya-Tulis-Ilmiah.pdf>.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di

- Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>.
- Rahman, A. (2022). *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes)*. Pascal Books.
- Rahman, A., & Bakri, R. (2019). Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governance. *Jurnal Konstituen IPDN*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309>.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sulistyowati, T. (2015). Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2748>
- Suryono, A. (2015). *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Universitas Negeri Malang.
- Umar, H. (2005). *Riset SDM Dalam Organisasi (Revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. (2014). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 149–162. <https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.149-162>.